

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana adalah situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tergantung pada cakupannya, bencana ini bisa merubah pola kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat yang normal menjadi rusak, menghilangkan harta benda dan jiwa manusia, merusak struktur sosial masyarakat, serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar (Effendi & Makhfaldi, 2009).

Sumatera barat adalah daerah yang berada di jalur patahan semangko, tepat berada di antara pertemuan dua lempeng besar yaitu Eurasia dan indo-australia yang artinya wilayah sumatera barat akan sering mengalami gempa. Adapun contoh dari gempa bumi yang pernah terjadi di Kota Padang adalah gempa dan tsunami 30 september 2009. Gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 7.9 SR dengan kedalaman 71 km dan pusat gempa berada pada 0,84 LS – 99,65 BT kurang lebih sekitar 57 km barat daya Kota Pariaman. Gempa tersebut telah memporak porandakan hampir seluruh wilayah Sumatera Barat, khususnya wilayah pantai Barat Sumatera Barat. Dampak yang ditimbulkan dari gempa tersebut adalah 2180 orang luka-luka dan 2650 bangunan rumah rusak berat/ringan termasuk gedung- gedung kantor, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, jalan, jembatan dengan kerusakan paling parah sepanjang pantai barat sumatera barat yang juga telah menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi terputus. Penyebab

tewasnya sebagian besar korban tertimpa reruntuhan bangunan dikarenakan konstruksi bangunan yang tidak aman.

Selain gempa, Sumatera Barat juga berada pada wilayah batas dua lempeng yaitu jalur palung laut dalam di sebelah barat Sumatera sampai ke Kepulauan Andaman. Lempeng Hindia menunjam di bawah Sumatera 50-60 cm/tahun dengan kemiringan sekitar 12 derajat. Bagian dangkal (di atas 60km) dari batas antara lempeng yang menunjam dan lempeng di atasnya disebut sebagai (patahan) *megathrust*. Patahan *Megathrust* ini berpotensi menimbulkan gempa dengan kekuatan di atas M8. Selain itu, aktivitas gempa dangkal di daerah *megathrust* juga berpotensi menimbulkan tsunami. Tsunami yang terakhir terjadi pada daerah tersebut pada tanggal 25 Oktober 2010 oleh gempa berkekuatan 7,2 SR yang berpusat di barat daya pulau Pagai Selatan.

Kerentanan wilayah Sumatera Barat untuk potensi gempa dan tsunami masih belum diimbangi dengan manajemen bencana yang memadai oleh pemerintah. Hal ini terlihat pada Banyaknya korban yang disebabkan oleh peristiwa gempa Padang 2009. Maka pembangunan infrastruktur yang membantu meminimalisir dampak bencana adalah salah satu solusi yang diperlukan. Infrastruktur yang dimaksud adalah *shelter*.

Shelter adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tujuan evakuasi tsunami. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berupa penyiapan lokasi evakuasi, salah satu tempat evakuasi vertikal yang telah disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah Tempat Evakuasi Sementara (TES). *Shelter* menjadi pilihan utama bagi

masyarakat yang tinggal di pesisir pantai atau zona merah untuk mengevakuasai diri saat terjadi bencana gempa bumi/tsunami. Menurut Republika.co.id kota padang memiliki 42 buah *shelter* berupa gedung perkantoran, hotel, dan masjid. Namun, hanya ada 4 buah *shelter* yang dibuat khusus penggunaannya untuk *shelter* di kota Padang. Keempat bangunan tersebut berada di kawasan Tabing, Ulak Karang, dan Air Tawar.

Shelter pada umumnya didirikan di kawasan pesisir pantai. setelah terjadinya gempa Padang 2009, kawasan pesisir pantai diindikasikan telah mengalami likuifaksi di beberapa titik. Hal ini terlihat pada saat setelah gempa, adanya rembesan air muncul dari rekahan tanah di sekitar pesisir pantai serta banyaknya bangunan yang miring. Berdasarkan hasil penelitian (Hakam, 2013) yang menyebutkan, bahwa salah satu *shelter* Padang yaitu yang berada di Ulak Karang terindikasi likuifaksi, yaitu pada kedalaman 4m dan 8m dengan kategori sangat berpotensi terlikuifaksi. Hal yang sangat tidak menguntungkan dari potensi likuifaksi setelah gempa Padang 2009 adalah daerah yang terindikasi likuifaksi umumnya merupakan daerah yang relatif padat pembangunan. Sama halnya dengan kejadian gempa dan likuifaksi di Palu yang terjadi bulan September tahun 2018. Kejadian tersebut berlokasi di Pantai Barat Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian utara pada tanggal 28 September 2018, pukul 18.02 WITA. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa bumi yang umumnya menghasilkan gaya guncangan yang sangat kuat dan tiba-tiba, menyebabkan tekanan air pori di kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa di Kota Palu naik seketika,

hingga melebihi kekuatan gesek tanah, sehingga terjadi *flow liquefaction* yang mengakibatkan tenggelamnya sekitar 1.747 unit rumah di Perumnas Balaroa dan di Kelurahan Petobo sekitar 744 unit rumah tenggelam.

Menurut Yu Ting Joanne Khew dalam jurnalnya yang berjudul *Assesment of social perception on the contribution of hard-infrastructur for tsnami mitigation to coastal community resilience after the 2010 tsunami*, 2015 menyatakan bahwa, *Shelter* dapat membantu masyarakat dalam pemulihan sosial dan ekonomi yang terkena dampak dari bencana di chili 2010. Hal tersebut terlihat pada kondisi masyarakat yang menggunakan *shelter* sebagai sarana sosial ekonomi yang dibentuk dari membudidayakan budaya evakuasi tsunami melalui simbol-simbol di jalanan dan bangunan yang digunakan dalam aktivitas sosial masyarakat yaitu sebagai sarana rekreasi.

Kota Padang telah memiliki *shelter* dan rambu-rambu evakuasi yang berada di sepanjang jalan. Namun hal tersebut belum meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya bencana yang mengancam Kota Padang. Hal tersebut terlihat pada kejadian gempa dengan kekuatan 7,8 SR yang berpusat di Mentawai. Menurut harian haluan.com, ketika gempa 7,8 SR terjadi, sebagian masyarakat masih banyak yang berdiri di depan rumah menunggu di kediamannya, dan sebagian lainnya memilih evakuasi menuju *shelter*.

Maka dengan banyaknya kasus mengenai gempa, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di daerah pesisir pantai serta adanya rujukan/penelitian mengenai pengurangan resiko bencana di atas, maka

diperlukan penelitian/survey terhadap persepsi masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai dalam hal penggunaan *shelter* sebagai salah satu usaha untuk mitigasi bencana di pesisir pantai Padang yang padat bangunan.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi persepsi masyarakat pesisir pantai terhadap keberadaan bangunan *shelter* yang ada di pesisir pantai Kota Padang.
- b. Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap penggunaan *shelter* yang berfungsi sebagai tempat evakuasi dari bencana tsunami.
- c. Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap penggunaan *shelter* yang rentan dari bencana likuifaksi.
- d. Mengidentifikasi manfaat *shelter* yang ada di pesisir pantai Kota Padang.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat menjadi masukan dalam mendesain *shelter*.
- b. Dapat menjadi masukan atau informasi bagi peneliti selanjutnya
- c. Dapat menjadi acuan bagi instansi terkait.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini mencakup:

- a) Persepsi masyarakat mengenai 4 *shelter* dan 3 bangunan yang bisa difungsikan sebagai *shelter* di wilayah pesisir Pantai Padang, Kota Padang.
- b) Penelitian dilakukan terhadap responden yang melakukan aktifitas dan bertempat tinggal di sekitar objek penelitian dan jarak tempat tinggal/aktifitas responden dari objek penelitian tidak dibatasi.

